

Mengonstruksi Otonomi Strategis: Identitas Non-Blok dalam Strategi *Hedging* Indonesia di Tengah Rivalitas AS-Tiongkok

Syifa Aprilia Putri¹
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
aprrlsyifa@gmail.com

Nanda Yulfi Chairunnisa²
Widya Erti Indonesia
nandayulfi90@gmail.com

Anggi Prastyono³
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai RI
anggiprastyono1999@gmail.com

Abstrak

Di tengah eskalasi persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kajian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia cenderung didominasi oleh pendekatan realisme pragmatis yang memandang strategi *hedging* semata sebagai kalkulasi manfaat materiil. Perspektif ini masih mengabaikan peran fundamental identitas dalam membentuk perilaku negara. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan teoritis tersebut dengan menganalisis prinsip Non-Blok sebagai identitas yang dikonstruksi secara intersubjektif dalam strategi *hedging* Indonesia saat ini. Dengan menggunakan kerangka Konstruktivisme, penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif analitis melalui studi kepustakaan yang mencakup pernyataan resmi, berita, buku dan artikel ilmiah. Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretatif untuk melacak pola narasi serta makna di balik keputusan strategis. Temuan utama menunjukkan bahwa strategi *hedging* Indonesia bukan sekadar taktik pragmatis sesaat, melainkan sebuah mekanisme aktif untuk mengkonstruksi otonomi strategis yang berakar pada identitas Non-Blok. Identitas ini beroperasi melalui mekanisme ganda; mempertahankan keterlibatan ekonomi dengan Tiongkok serta menjaga kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat guna mengubah persepsi ambiguitas menjadi daya tawar nyata. Studi ini merekomendasikan agar Indonesia mengapitalisasi identitas tersebut untuk bergerak melampaui fleksibilitas diplomatik menuju kepemimpinan aktif dalam pembentukan norma di Indo-Pasifik.

Kata Kunci: identitas Non-Blok, Kebijakan Luar Negeri Indonesia, konstruktivisme, otonomi strategis, strategi *hedging*.

PENDAHULUAN

Rivalitas antara AS dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik membawa tatanan internasional pada ketidakpastian baru. Kawasan Indo-Pasifik telah berkembang

menjadi arena kontestasi geopolitik yang mengintegrasikan kepentingan dua kekuatan besar dalam membentuk struktur dan distribusi kekuatan kawasan (Ped-rason, 2021). Kontestasi antara AS dan

Tiongkok berlangsung dalam berbagai dimensi; ekonomi, militer, teknologi, diplomasi hingga ideologis, yang keseluruhannya berkontribusi pada dinamika yang semakin sulit diprediksi. AS mendorong strategi Free and Open Indo-Pacific dan memperkuat jejaring keamanannya melalui inisiatif seperti Australia, United Kingdom, United States (AUKUS) dan Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) yang bertujuan menyeimbangkan pengaruh Tiongkok yang semakin meluas di kawasan. Di sisi lain, Tiongkok terus memperluas kehadiran ekonomi dan militernya, melalui inisiatif Belt and Road (BRI) dan langkah strategisnya melalui klaim sepuluh garis putus-putus (ten-dash line) yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) beberapa negara Asia Tenggara.

Kondisi ini menempatkan negara-negara di kawasan dalam posisi yang sulit. Negara-negara *middle power* menghadapi tekanan baru untuk menentukan bagaimana mereka akan menavigasi sistem internasional yang semakin terpolarisasi. Rivalitas AS - Tiongkok telah menciptakan tantangan strategis bagi negara-negara Asia yang kini harus menyeimbangkan kepentingan, membangun kerja sama ekonomi, namun tetap berhati-hati terhadap meningkatnya otoritarianisme dan pengaruh Tiongkok di kawasan (Jung et al, 2020). Hal ini turut berimplikasi bagi Indonesia, dengan posisi geostrategis yang berada di pusat jalur perdagangan dunia dan memiliki ekonomi terbesar di

Asia Tenggara, Indonesia tidak mungkin menghindari dari tekanan struktural yang dihasilkan oleh rivalitas AS-Tiongkok. Letak strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menjadikannya pemain potensial dalam persaingan geopolitik dan geostrategis AS-Tiongkok (Ibrahim et al, 2023). Interaksi dengan kedua negara bersifat krusial namun tidak seimbang dalam dimensinya masing-masing. mengingat kedua negara merupakan mitra penting baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan.

Ketergantungannya pada Tiongkok sebagai mitra dagang utama, sumber investasi, dan pemain penting dalam pembangunan infrastruktur membuat hubungan ekonomi dengan Beijing sangat signifikan. Proyek-proyek strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, smelter nikel, hingga investasi kawasan industri memperkuat posisi Tiongkok dalam pembangunan nasional Indonesia. Namun, hubungan ekonomi yang erat ini beriringan dengan sensitivitas politik dan keamanan, terutama terkait ketegangan di Laut Cina Selatan, issue kehadiran nelayan dan kapal *coast guard* Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, serta perluasan pengaruh ekonomi-politik Beijing di kawasan.

Sementara itu, Amerika Serikat memiliki posisi penting dalam dimensi keamanan maritim Indonesia. Kedua negara memiliki kerja sama yang kuat dalam *capacity-building* pertahanan, latihan militer,

dan peningkatan kemampuan maritim Indonesia. Kehadiran AS juga dianggap penting dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama terkait kebebasan navigasi dan upaya menahan ekspansi Tiongkok. Kemampuan AS dalam memberikan *deterrence* di kawasan menjadikan AS sebagai mitra kunci dalam menjaga tatanan Indo-Pasifik yang stabil. Kedekatan Indonesia dengan AS dalam isu-isu keamanan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan Indonesia dalam menjaga stabilitas di kawasan.

Perbedaan kepentingan tersebut menciptakan dilema bagi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan nasional dan menarik investasi dalam skala besar. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan keterlibatan AS dalam meningkatkan kapasitas keamanan dan menjaga stabilitas regional yang merupakan kepentingan vital. Ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan pada dua kekuatan besar inilah yang membuat Indonesia tidak mungkin bersikap terlalu condong secara eksplisit kepada salah satu pihak tanpa menghadapi konsekuensi strategis yang signifikan.

Dalam menghadapi dilema ini, Indonesia mengadopsi strategi *hedging* yang memungkinkan Indonesia menjaga hubungan dengan kekuatan besar tanpa membuat komitmen yang mengikat dengan salah satunya. Indonesia mengupayakan hubungan yang setara berdasarkan kerja sama yang saling

menguntungkan dan bertujuan untuk menjaga rasa saling percaya di tengah dinamika pembangunan yang terus berkembang di ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik (Simatupang, 2025). Beberapa langkah yang dapat dilihat adalah kerja sama ekonomi intensif dengan Tiongkok sambil menjaga hubungan keamanan dengan AS, menolak aliansi formal serta mempromosikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Strategi ini memberikan Indonesia fleksibilitas untuk memaksimalkan keuntungan dari kedua belah pihak dan menekan risiko dari ketidakpastian dalam sistem internasional.

Namun, sebagian besar kajian mengenai strategi *hedging* Indonesia masih menempatkan strategi ini sebagai hasil kalkulasi material. Banyak analisis menekankan dimensi untung-rugi, risiko, dan utilitas dalam merangkum tindakan Indonesia. Berbagai analisis ini cenderung melihatnya dari lensa pragmatis atau realis, di mana Mubah A. Safril (2019) mengidentifikasinya sebagai strategi *double hedging* untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan. Iksan dan Soong (2023) juga menegaskan dorongan pragmatis ini dengan menyoroti target pembangunan ekonomi domestik sebagai alasan utamanya. Bahkan, ketika Anwar (2023) mengusulkan konsep *hedging plus* yang memasukkan unsur diplomasi normatif, prinsip bebas aktif tetap diposisikan sebagai tambahan pada kalkulasi strategis yang sudah ada. Perspektif ini bermanfaat

dalam menjelaskan bagaimana Indonesia mengelola tekanan eksternal, tetapi belum menjelaskan mengapa Indonesia memiliki kecenderungan untuk tidak berpihak meskipun adanya pergeseran sistem internasional dari era Perang Dingin hingga era saat ini. Pendekatan yang menekankan kalkulasi keuntungan sering kali mengabaikan bagaimana identitas politik luar negeri Indonesia, yang berakar pada prinsip Bebas Aktif dan sejarah panjang Non-Blok, membentuk preferensi strategis dan batas-batas tindakan yang dianggap dapat diterima oleh pembuat kebijakan Indonesia.

Dalam konteks ini, identitas Non-Blok perlu dipahami bukan sebagai pilihan teknis untuk tidak berpihak, melainkan sebagai orientasi normatif yang telah membentuk cara Indonesia memaknai lingkungan strategisnya sejak awal kemerdekaan. Identitas ini membentuk pola persepsi yang melekat, termasuk bagaimana Indonesia melihat Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai dua kekuatan besar yang paling berpengaruh di kawasan. Melalui kacamata konstruktivisme yang menekankan pada aspek identitas, kepentingan utama Indonesia didasari pada kepentingan untuk mempertahankan otonomi strategis dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar. Oleh karena itu, strategi *hedging* yang diadopsi Indonesia dapat dilihat sebagai praktik identitas.

Minimnya analisis konstruktivisme yang menekankan aspek identitas dalam

literatur terkait strategi *hedging* yang diadopsi Indonesia menciptakan celah penting. Tanpa memperhatikan aspek normatif, analisis hanya menjelaskan “bagaimana Indonesia bertindak”, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan “mengapa Indonesia memilih bertindak demikian”. Konstruktivisme menawarkan kerangka yang lebih memadai untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menekankan bahwa identitas membentuk kepentingan dan preferensi strategis negara. Melalui perspektif ini, *hedging* dipahami bukan hanya sebagai respons pragmatis, melainkan juga sebagai praktik identitas yang terus direproduksi dalam praktik diplomatik Indonesia.

Lebih lanjut, untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana identitas Non-Blok beroperasi sebagai kerangka normatif yang membentuk preferensi, kepentingan dan pilihan strategis Indonesia dalam menghadapi rivalitas AS-Tiongkok. Kajian ini mengisi celah yang belum banyak dibahas dalam literatur, yakni kurangnya perhatian terhadap dimensi identitas dalam menjelaskan konsistensi penggunaan strategi *hedging*. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama: “bagaimana identitas Non-Blok membentuk otonomi strategis Indonesia melalui praktik *hedging* dalam menghadapi rivalitas AS-Tiongkok?” Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme Wendt, artikel ini menawarkan perspektif alternatif yang menempatkan *hedging*

bukan sekadar sebagai kalkulasi material, melainkan sebagai manifestasi dari konstruksi identitas Indonesia sebagai upaya dalam mempertahankan otonomi strategisnya. Melalui analisis ini, penelitian berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara identitas dan strategi negara *middle power*, sekaligus melengkapi literatur politik luar negeri Indonesia dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan prinsip Non-Blok tetap relevan dalam membingkai respons Indonesia terhadap dinamika Indo-Pasifik kontemporer.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan konstruktivisme praktis sebagai landasan teori utama. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa identitas dan kepentingan negara tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk dan dipertahankan melalui praktik-praktik sosial yang dilakukan secara berulang oleh aktor negara. Konstruktivisme praktis memberikan kerangka yang lebih operasional untuk memahami bagaimana ide dan identitas politik tidak hanya dimiliki, tetapi juga “dilakukan” dan direproduksi melalui tindakan konkret dalam kebijakan luar negeri.

Untuk memahami dasar pemikiran teori ini, penting terlebih dahulu melihat fondasi konstruktivisme sebagaimana dijelaskan oleh Alexander Wendt (1995). Menurut Wendt, struktur internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ma-

terial, tetapi juga oleh ide, norma dan identitas yang terbentuk secara intersubjektif. Negara bertindak berdasar-kan bagaimana mereka memahami diri mereka (*self-identity*) dan bagaimana mereka memaknai aktor lain. Identitas negara memengaruhi kepentingan, dan kepentingan tersebut kemudian memengaruhi perilaku kebijakan luar negeri. Dengan demikian, kepentingan bukanlah sesuatu yang “diberikan” atau objektif, melainkan dikonstruksi melalui proses sosial dan interpretatif.

Dalam konteks Indonesia, kerangka konstruktivis ini membantu menjelaskan bagaimana identitas Non-Blok terbentuk sebagai bagian dari *self-identity* nasional. Identitas Non-Blok Indonesia tidak hanya muncul sebagai respons terhadap rivalitas Perang Dingin, tetapi merupakan konstruksi ideasional yang berakar pada pengalaman historis seperti anti-kolonialisme, solidaritas dunia ketiga dan aspirasi untuk mempertahankan otonomi dalam politik global. Narasi historis Konferensi Asia-Afrika 1955 dan peran Indonesia dalam pembentukan Gerakan Non-Blok memperkuat citra diri sebagai negara yang independen dan menolak dominasi kekuatan besar. Identitas tersebut kemudian dilembagakan dalam prinsip politik luar negeri Bebas-Aktif, yang berfungsi sebagai pedoman normatif lintas rezim.

Namun, pemahaman tentang identitas saja tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana identitas Non-Blok ini tetap

bertahan dan direproduksi dalam kebijakan luar negeri kontemporer Indonesia. Pada titik inilah konstruktivisme praktis menjadi relevan. Pendekatan ini menekankan bahwa identitas negara tidak hanya dibentuk oleh ide atau sejarah, tetapi dipertahankan melalui praktik sosial yang bermakna dan berulang, seperti aktivitas diplomatik, proses pengambilan keputusan, wacana politik, dan ritual internasional (Adler & Pauliot, 2011). Praktik-praktik ini menjadi mekanisme yang membuat identitas tetap hidup dan nyata dalam interaksi internasional.

Salah satu praktik utama yang mereproduksi identitas Non-Blok Indonesia saat ini adalah strategi *hedging*. Dengan mengombinasikan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang keamanan dan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, Indonesia menjalankan pola tindakan yang konsisten dengan prinsip tidak memihak dan menjaga otonomi strategis. Skema *strategic hedging* menjadi pilihan strategis yang paling rasional bagi Indonesia dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, tekanan geopolitik, dan prinsip politik luar negeri yang diusungnya, di mana Indonesia perlu mencari mitra strategis alternatif untuk meningkatkan daya tawar geopolitiknya (Basundoro, 2023). *Hedging* berfungsi sebagai praktik identitas karena melalui tindakan tersebut Indonesia menunjukkan performativitas sebagai negara Non-Blok di tengah persaingan dua kekuatan besar.

Selain *hedging*, terdapat beberapa praktik lain yang turut memperkuat identitas Non-Blok Indonesia. Praktik diplomasi tampak dalam peran Indonesia sebagai mediator atau *bridge-builder* di beberapa forum internasional. Salah satu forum multilateral yang juga mengindikasikan peningkatan peran Indonesia sebagai *bridge-builder* bagi *Global South* adalah BRICS (Nugraha et al., 2025). Praktik wacana terlihat dari penggunaan istilah seperti “Bebas-Aktif,” “ke-seimbangan strategis,” atau “otonomi diplomatik” dalam pernyataan resmi pemerintah. Sementara praktik ritual, termasuk partisipasi aktif dalam pertemuan Gerakan Non-Blok atau negara-negara Selatan, berfungsi memperbarui dan menegaskan kembali identitas historis tersebut.

Dengan demikian, melalui Konstruktivisme Praktis, penelitian ini menjelaskan bahwa identitas Non-Blok Indonesia tidak hanya terbentuk dari pengalaman historis dan ide kolektif, tetapi juga dipertahankan melalui praktik kebijakan luar negeri konkret. Teori ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana Indonesia tetap konsisten dengan prinsip Non-Blok sambil tetap fleksibel menavigasi dinamika geopolitik, khususnya dalam rivalitas AS-Tiongkok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami kompleksitas konstruksi identitas negara dalam politik

internasional. Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian untuk memahami fenomena kompleks yang tidak dapat diukur dengan angka, yaitu konstruksi identitas negara dan pengaruhnya terhadap strategi kebijakan luar negeri (Creswell & Poth, 2016). Secara spesifik, penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivisme sebagai kerangka metodologis untuk memahami proses pembentukan makna di balik kebijakan *hedging* Indonesia. Berbeda dengan pendekatan yang berbasis pada pengukuran statistik, metode ini menekankan pada analisis data kualitatif dan bukti-bukti yang sifatnya interpretatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik narasi kebijakan yang kompleks.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan. Untuk mempertajam fokus analisis, penelitian ini membatasi rentang waktu pengambilan data pada periode 2014 hingga 2025. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada urgensi dinamika era pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga awal era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana rivalitas AS-Tiongkok mengalami eskalasi tajam yang menuntut respons strategis Indonesia melalui inisiatif. Dalam periode tersebut, data diperoleh dari dokumen resmi negara yang merepresentasikan sikap strategis Indonesia, artikel jurnal, buku dan laporan lembaga pemikir untuk memberikan konteks akademis.

Untuk menjamin ketajaman interpretasi, data yang terkumpul dianalisis menggunakan Model Analisis Interaktif (*Interactive Analysis Model*) yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Berbeda dengan model analisis linear, metode ini bersifat siklikal dan interaktif, di mana proses analisis terjadi secara simultan dengan pengumpulan data. Tahapan analisis dimulai dengan kondensasi data, dilanjutkan dengan penyajian data yang memetakan hubungan antara identitas dan kebijakan menggunakan teori konstruktivisme, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Alur analisis ini tidak berjalan linear, melainkan interaktif dan berkelanjutan sepanjang proses penelitian untuk memastikan validitas interpretasi yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Non-Blok dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Identitas Non-Blok terbentuk melalui proses historis dan sosial yang panjang dan identitas ini menjadi fondasi bagi bagaimana Indonesia memaknai serta merespon dinamika geopolitik yang terjadi. Identitas ini tidak hadir sebagai pilihan teknis untuk “tidak memihak,” melainkan sebagai orientasi normatif yang menempel kuat pada *self-identity* Indonesia sebagai negara yang mendukung ide anti-kolonialisme, *solis*-daritas dunia ketiga dan independensi dalam pengambilan keputusan.

Identitas yang juga dibentuk melalui pengalaman kolektif membentuk cara Indonesia melihat dunia. Identitas membentuk pola persepsi yang mempengaruhi bagaimana Indonesia membaca peluang, ancaman dan tekanan dari kekuatan besar. Identitas ini kemudian menurunkan kepentingan utama, yakni menjaga otonomi strategis dan pada akhirnya mengarahkan respons kebijakan luar negeri yang konsisten dengan prinsip tersebut.

Kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten dengan prinsip Non-Blok dan Bebas Aktif tampak dalam pilihannya mengadopsi strategi *hedging* untuk menghadapi rivalitas AS-Tiongkok. Strategi *Hedging* adalah cara suatu negara menjaga diri dari ketidakpastian dengan tetap bekerja sama sekaligus menyiapkan langkah antisipatif jika mitra berpotensi berubah menjadi ancaman (Pratama, 2020). Dalam konteks ini, *hedging* bukanlah sekadar kalkulasi strategis, tetapi manifestasi atau “praktik identitas” Indonesia yang menekankan independensi dan fleksibilitas dalam menghadapi tekanan eksternal.

Melihat strategi *hedging* dalam kaca mata tersebut, dapat dipahami bahwa sebagai negara yang mengidentifikasi diri dengan prinsip Non-Blok dan Bebas Aktif, Indonesia melihat rivalitas kekuatan besar bukan sebagai tekanan untuk berpihak, melainkan sebagai ancaman terhadap ruang otonomi strategis yang ingin diper-

tahankan. Melihatnya dari kaca mata konstruktivisme, bahwa identitas membentuk kepentingan, Indonesia tidak menempatkan AS sebagai pelindung ataupun Tiongkok sebagai patron ekonomi. Kepentingan utamanya adalah menjaga kebebasan menentukan arah kebijakan secara independen. Perbedaan cara pandang terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok, dapat dipahami bahwa langkah yang diambil bukan hasil dari kalkulasi untung-rugi, tetapi mencerminkan bagaimana identitas Non-Blok menciptakan kerangka interpretasi yang membimbing pilihan kebijakan.

AS adalah mitra keamanan sekaligus aktor yang mampu menekan ancaman dari negara lain untuk mengikuti agenda strategisnya. Kehadiran AS masih diperlukan sebagai penyeimbang terhadap meningkatnya kehadiran Tiongkok yang agresif di Laut Natuna Utara (Simatupang, 2025). Namun, kepentingan Indonesia yang tidak semata-mata menjadikan AS sebagai negara pelindung membuatnya tidak terikat pada AS ataupun aliansi. Kemitraan strategis Indonesia-AS berperan sebagai instrumen operasional untuk mengonsolidasikan kepentingan bersama di Indo-Pasifik, khususnya melalui penguatan kerja sama pertahanan dan latihan militer Garuda Shield yang menjadi sarana interoperability dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan akibat meningkatnya kompetisi strategis dengan Tiongkok (Montolalu & Perwita,

2023). Penolakan terhadap aliansi ditegaskan ketika hadirnya AUKUS. Indonesia mengkhawatirkan AUKUS akan berpotensi meningkatkan perlombaan senjata dan power projection di kawasan yang pada akhirnya berbuntut pada instabilitas (Marsudi dalam CNN, 2021). Melihatnya dari respon tersebut, AUKUS dilihat Indonesia sebagai pembentuk identitas kawasan baru yang tidak sejalan dengan preferensi normatif ASEAN. Adapun, AUKUS dinilai sebagai ketidaksesuaian aliansi tersebut dengan identitas Indonesia yang menolak blok-blok keamanan eksklusif.

Serupa dengan hubungan Indonesia dengan Tiongkok yang lebih sering dipahami sebagai peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Pada 2023, nilai perdagangan Indonesia dan Tiongkok mencapai sekitar US\$127,8 miliar, menjadikan Tiongkok salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia (Andrena, 2025). Selain itu, Indonesia bersedia menerima investasi infrastruktur besar dari Tiongkok melalui Belt and Road Initiative. Tiongkok menjadi mitra paling strategis dalam mendukung pembangunan di Indonesia selama satu dekade terakhir (Sumarwan, 2024). Meskipun secara ekonomi Tiongkok adalah mitra paling menguntungkan, Indonesia tetap mempertahankan narasi bahwa hubungan tersebut adalah kerja sama pembangunan, bukan kebijakan yang menempatkan Indonesia dalam orbit Tiongkok.

Hal ini dipertegas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, ketika kunjungannya

ke Tiongkok bahwa Indonesia ingin memperdalam koordinasi strategis dan kerja sama komprehensif dengan Tiongkok di berbagai sektor, tetap memegang prinsip Satu Tiongkok, menjalankan kebijakan luar negeri bebas-aktif tanpa bergabung blok atau aliansi militer mana pun, serta memperkuat kolaborasi di forum multilateral untuk mendorong kepentingan Global South dan tatanan dunia multipolar (Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok, 2024). Dengan menegaskan kembali Bebas-Aktif dalam konteks hubungan dengan Tiongkok, Indonesia secara simultan mereproduksi identitas Non-Blok yang menjadi pedoman perilaku negara.

Selain itu, penekanan pada kerja sama multilateral untuk memperkuat Global South menunjukkan bagaimana Indonesia memaknai dirinya sebagai aktor normatif, bukan sekadar penerima tekanan struktural. Indonesia menampilkan diri sebagai negara yang ingin membentuk tatanan multipolar yang lebih inklusif, sesuai dengan persepsi diri sebagai *bridge-builder* dan advokat bagi negara-negara berkembang. Dengan demikian, pernyataan Prabowo tidak hanya mencerminkan kalkulasi kepentingan, tetapi juga tindakan performatif yang menegaskan identitas terkait siapa Indonesia, apa yang diperjuangkan dan bagaimana ia ingin dilihat oleh komunitas internasional. Ini adalah praktik identitas negara di mana negara bertindak bukan hanya karena kepentingan material, tetapi karena keyakinan mengenai peran yang seharusnya ia

mainkan. Adapun, dalam konteks multipolar saat ini, prinsip Non-Blok memperoleh relevansi baru karena memberikan fleksibilitas strategis bagi Indonesia untuk terlibat dengan banyak kekuatan tanpa terikat pada satu pusat kekuasaan. Prinsip ini memungkinkan diversifikasi kemitraan sekaligus mengurangi risiko ketergantungan struktural.

Lebih lanjut, strategi *hedging* Indonesia sering dipahami sebagai strategi pragmatis untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari Tiongkok sambil menjaga hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat. Namun dari sudut pandang konstruktivisme, *hedging* yang diadopsi Indonesia lebih tepat dipahami sebagai ekspresi dari identitasnya sebagai stabilisator dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar. Indonesia tidak hanya reaktif terhadap rivalitas AS-Tiongkok dengan menyeimbangkan kedua pihak, tapi juga proaktif dalam membangun tatanan regional yang lebih stabil lewat penciptaan norma (aturan perilaku) dan institusi (wadah kerja sama) yang diharapkan membentuk perilaku negara-negara besar di Indo-Pasifik (Anwar, 2023b).

Persepsi tersebut melahirkan konstruksi identitas bahwa Indonesia melihat dirinya bukan sebagai pengikut kekuatan besar, melainkan sebagai penyeimbang normatif yang berperan menjaga keterbukaan kawasan dan menghindari polarisasi. Praktik identitas ini dapat dilihat pengelolaan persaingan AS-Tiongkok di Indo-Pasifik. Dibanding memilih salah satu

keberpihakan kepada AS atau Tiongkok, Indonesia menginisiasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai kerangka normatif alternatif. AOIP menekankan keterbukaan, inklusivitas dan kerja sama. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya reaktif terhadap rivalitas, tetapi juga proaktif membentuk aturan dan norma regional. Hal serupa terlihat dalam presidensi G20 tahun 2022, ketika Indonesia berhasil menjaga forum tetap solid meski perang Ukraina memicu ketegangan antara Barat dan Rusia-Tiongkok. Kapasitas Indonesia memediasi perbedaan pandangan di G20 memperkuat citra diri sebagai *bridge-builder* antara Global South dan kekuatan besar.

Identitas Non-Blok pada akhirnya berfungsi sebagai kerangka interpretatif yang memungkinkan Indonesia memahami, mengelola, dan memodifikasi dinamika geopolitik secara konsisten. Melalui identitas ini, Indonesia menjaga kedaulatan, memperkuat kepemimpinan di ASEAN dan forum global, serta memastikan dirinya tidak terjerumus dalam orbit AS maupun Tiongkok. Strategi *hedging* Indonesia dengan demikian muncul sebagai manifestasi dan praktik identitasnya serta wujud ekspresi peran yang ingin dijalankan Indonesia di dalam sistem internasional.

Dampak Persepsi Internasional terhadap Posisi Strategis Indonesia

Penerapan strategi *hedging* Indonesia dalam merespons rivalitas kekuatan besar tidak berjalan secara monolitik

melainkan beroperasi melalui mekanisme ganda yang dipandu oleh konstruksi identitas yang berbeda. Jika dibedah menggunakan pisau analisis konstruktivis Alexander Wendt maka Indonesia menerapkan pendekatan yang terpisah namun saling melengkapi yakni mengaktifkan identitas kolektif dalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan mempertegas identitas korporat dalam kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat. Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk menyerap manfaat dari kedua kutub kekuatan tanpa terjebak dalam aliansi kaku yang dapat mencederai prinsip bebas aktif.

Dalam menghadapi ekspansi ekonomi Tiongkok yang masif, Indonesia sering kali dihadapkan pada dilema antara kebutuhan pembangunan infra- struktur dan kekhawatiran akan dominasi asing. Namun data menunjukkan bahwa keterlibatan ekonomi Indonesia justru semakin dalam yang terlihat dari partisipasi aktif Indonesia dalam *Belt and Road Initiative* dan realisasi proyek strategis nasional seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung serta hilirisasi industri nikel. Alasan Indonesia tetap membuka diri di tengah persepsi risiko tersebut terletak pada konstruksi identitas kolektif yang dibangun Indonesia terhadap Tiongkok.

Identitas kolektif menciptakan perasaan solidaritas atau rasa kebersamaan yang berbasis pada kesamaan sejarah dan nasib sebagai negara berkembang atau *Global South*. Dalam kerangka ini investasi Tiongkok dalam proyek Kereta

Cepat atau fasilitas pemurnian nikel tidak dibingkai sebagai instrumen hegemoni melainkan sebagai manifestasi kerja sama Selatan Selatan untuk mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari Barat (Riska, 2024). Narasi ini memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk menerima pragmatisme ekonomi Tiongkok sebagaimana terlihat dalam sinkronisasi Poros Maritim Dunia dengan Jalur Sutra Maritim karena dianggap selaras dengan visi pembangunan domestik (Mubah A. Safril, 2019; Yoshimatsu, 2022). Dengan demikian penerimaan Indonesia terhadap ekonomi Tiongkok bukan didasari oleh ketundukan melainkan oleh rasa solidaritas kolektif untuk tumbuh bersama sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia (Priamarizki, 2024).

Sebaliknya interaksi Indonesia dengan Amerika Serikat dipandu oleh logika identitas korporat yang merujuk pada kebutuhan intrinsik negara untuk melindungi atribut fisiknya yaitu integritas teritorial dan kedaulatan. Sebagai negara kepulauan yang strategis Indonesia menghadapi tantangan nyata berupa intrusi di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara akibat klaim tumpang tindih dengan Tiongkok (Zou, 2023; Irawan & Carnegie, 2025). Untuk melindungi aspek fisik negara ini Indonesia membutuhkan kapasitas militer yang mumpuni yang saat ini belum dapat dipenuhi secara mandiri. Oleh karena itu Indonesia merangkul Amerika Serikat bukan untuk membentuk

aliansi ideologis melainkan untuk memenuhi kebutuhan dasar identitas korporatnya yakni keamanan fisik.

Oleh karena itu, Indonesia merangkul Amerika Serikat bukan untuk membentuk aliansi ideologis, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dasar identitas korporatnya, yaitu keamanan fisik. Implementasi konkret dari strategi ini terlihat pada peningkatan skala latihan militer *Super Garuda Shield*, yang kini telah berkembang menjadi latihan gabungan multinasional terbesar di kawasan, serta pengiriman perwira militer Indonesia untuk menempuh pendidikan di institusi militer AS (Laksmiana, 2021). Kerja sama ini, termasuk transfer persenjataan dan *capacity building*, diposisikan sebagai upaya vital untuk menjaga kedaulatan maritim dan menciptakan penangkalan (*deterrence*) di Laut Cina Selatan (Muhibat, 2016).

Meskipun Washington memandang Indonesia sebagai mitra kunci demokratis dan '*swing state*' untuk menyeimbangkan Tiongkok (Anwar, 2020), Indonesia tetap membatasi hubungan ini pada level teknis-strategis. Kebijakan *limited bandwagoning* dengan AS ini dilakukan semata-mata untuk menjaga stabilitas kawasan tanpa secara langsung menantang Tiongkok secara terbuka (Gerstl, 2022). Dengan memisahkan urusan ekonomi (Identitas Kolektif dengan Tiongkok) dan urusan keamanan (Identitas Korporat dengan AS), Indonesia berhasil mengonstruksi posisi otonom yang memungkinkan memaksimalkan keuntungan

nasional sekaligus memitigasi risiko dari kedua belah pihak (Iksan & Soong, 2023; Yan, 2023).

Evaluasi Efektivitas Prinsip Non-Blok sebagai Instrumen Kenaikan Kelas, Daya Tawar, dan Pengelolaan Ambiguitas Indonesia

Bagian ini menyajikan penilaian kritis terhadap efektivitas prinsip Non-Blok yang diterapkan Indonesia di tengah persaingan kekuatan besar saat ini. Evaluasi ini dilakukan melalui lensa Konstruktivisme Praktis, yang menekankan bahwa identitas dan kepentingan negara bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi dibentuk dan dipertahankan melalui praktik sosial yang berulang. Fokus analisis ini ada pada tiga dimensi: pertama, apakah prinsip Non-Blok berhasil mendorong Indonesia naik kelas sebagai middle power; kedua, apakah prinsip ini meningkatkan daya tawar (*bargaining power*); dan ketiga, bagaimana Indonesia mengelola potensi ambiguitas yang muncul dalam interaksi global. Analisis ini menyimpulkan bahwa prinsip Non-Blok, yang bersumber dari identitas normatif Bebas Aktif, terbukti sangat efektif sebagai strategi adaptif proaktif, bukan sekadar kebijakan netral reaktif.

Identitas Non-Blok Indonesia telah menjadi fondasi ideologis yang memungkinkan negara ini naik kelas dari negara berkembang biasa menjadi *middle power* yang berpengaruh secara global. Kenaikan kelas ini tidak semata diukur dari

kekuatan militer atau ekonomi, tetapi melalui pengaruh normatif dan kepemimpinan yang ditunjukkan dalam praktik kebijakan luar negeri. Dalam kerangka Konstruktivisme Praktis, identitas bukan hanya dimiliki, tetapi direproduksi melalui praktik konkret seperti diplomasi multilateral, wacana politik, dan ritual internasional (Adler & Pauliot, 2011). Kredibilitas moral yang tinggi yang diperoleh dari identitas Non-Blok berfungsi sebagai aset *soft power*, yang bersumber dari sejarah panjang Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan, anti - kolonialisme dan kepentingan *Global South*.

Kepemimpinan berbasis prinsip di Non-Blok menempatkan Indonesia sebagai negara yang bertindak berdasarkan identitas, bukan sekadar kepentingan material atau afiliasi blok kekuatan besar. Keaktifan Indonesia dalam advokasi isu global, seperti perdamaian, keadilan iklim, dan kemerdekaan Palestina, merupakan bentuk praktik identitas yang menegaskan *self-identity* Indonesia sebagai negara Non-Blok (Liviana et al., 2023). Kekuatan ekonomi dan peran aktif di forum internasional semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai *middle power* yang berintegritas.

Diplomasi multilateral yang efektif menunjukkan bagaimana praktik identitas Non-Blok direalisasikan dalam tindakan konkret. Indonesia, meskipun tidak memiliki kekuatan veto di PBB, mampu menjadi penengah (mediator) yang kredibel, misal-

nya melalui Presidensi G20, yang menegaskan kemampuannya untuk menciptakan lingkungan strategis sendiri tanpa terikat pada aliansi kekuatan besar (Samosir et al., 2024). Kenaikan kelas Indonesia sebagai *middle power* juga tercermin dari kemampuannya membentuk aturan main regional, seperti melalui inisiasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang menegaskan sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik (Paramitha et al., 2025). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa identitas Non-Blok bukan sekadar simbol historis, tetapi dipraktekkan secara nyata dalam arena diplomasi.

Identitas Non-Blok juga menjadi instrumen utama untuk meningkatkan daya tawar Indonesia. Melalui strategi *hedging*, Indonesia menjaga hubungan baik dengan AS dan Tiongkok tanpa terikat pada aliansi formal, sehingga menciptakan otonomi strategis. Praktik *hedging* ini mencerminkan performativitas identitas Non-Blok, di mana tindakan diplomatik mencerminkan prinsip Bebas Aktif secara nyata (Kusumadewi & Wiswayana, 2024b; Febrian, 2023). Hedging memungkinkan Indonesia mendapatkan keuntungan ekonomi dan keamanan secara simultan, tanpa mengorbankan otonomi strategis.

Selain *hedging*, identitas Non-Blok direproduksi melalui praktik lain seperti diplomasi, wacana, dan ritual. Diplomasi tampak dalam peran Indonesia sebagai mediator atau bridge-builder di forum internasional, termasuk BRICS, yang menegaskan kepemimpinan Indonesia bagi

Global South. Praktik wacana muncul melalui istilah “Bebas-Aktif,” “keseimbangan strategis,” dan “otonomi diplomatik”. Praktik ritual terlihat dari partisipasi aktif dalam pertemuan Gerakan Non-Blok dan forum negara-negara Selatan, yang menegaskan kembali identitas historis Indonesia.

Kritik yang menilai sikap Indonesia sebagai ambigu atau bimbang keliru jika dilihat dari lensa Konstruktivisme Praktis. Ambiguitas yang terlihat sebenarnya merupakan strategi adaptif yang disengaja, yang menunjukkan fleksibilitas identitas Non-Blok. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menjaga *limited bandwagoning* dengan AS di bidang keamanan, sambil tetap melakukan *deep engagement* dengan Tiongkok di ranah ekonomi, tanpa kehilangan kredibilitas sebagai negara Non-Blok (Putri et al., 2025). Dalam kata lain, prinsip Non-Blok (Bebas Aktif) adalah identitas strategis yang dibangun historis dan dipertahankan melalui praktik sosial. Identitas ini terbukti efektif karena mengukuhkan Indonesia sebagai *middle power* dengan pengaruh normatif, meningkatkan daya tawar melalui strategi hedging yang terencana, dan mengubah potensi ambiguitas menjadi fleksibilitas strategis untuk mempertahankan kedaulatan di era persaingan kekuatan besar.

Dengan demikian, Non-Blok bukan sekadar warisan sejarah, tetapi *grand strategy* dinamis, yang memungkinkan Indonesia untuk memimpin, bernegosiasi, dan menolak dominasi dalam tatanan global kontemporer, sesuai dengan prinsip

Konstruktivisme Praktis yang menekankan identitas sebagai hasil praktik sosial yang berulang dan bermakna.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok tidak dapat dijelaskan hanya melalui kalkulasi material, tetapi berakar pada identitas Non-Blok yang dibentuk secara historis, dilembagakan dalam prinsip Bebas-Aktif dan terus direproduksi melalui praktik diplomasi. Identitas ini menjelaskan konsistensi Indonesia dalam menjaga jarak dari aliansi, mempertahankan fleksibilitas, dan menyeimbangkan hubungan dengan dua kekuatan besar tersebut. Temuan utama memperlihatkan dua mekanisme identitas yang membentuk strategi Indonesia: hubungan ekonomi dengan Tiongkok dibingkai melalui identitas kolektif sebagai sesama negara *Global South*, sedangkan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat mengikuti logika identitas korporat untuk melindungi kedaulatan dan stabilitas maritim tanpa bergantung pada aliansi. Kedua mekanisme ini menegaskan bahwa hedging bukanlah ambiguitas, tetapi strategi yang selaras dengan identitas Non-Blok dan menopang posisi Indonesia sebagai *middle power* yang aktif mempromosikan keterbukaan dan inklusivitas kawasan melalui forum seperti ASEAN dan G20.

Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Identitas Non-Blok bukan sekadar warisan

historis, melainkan aset strategis yang secara normatif men-justifikasi pilihan Indonesia untuk tidak beraliansi, menerapkan hedging, serta menjaga keseimbangan hubungan dengan AS dan Tiongkok. Dengan memanfaatkan identitas ini sebagai landasan kebijakan, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar, memperluas ruang diplomasi, dan mempertahankan otonomi strategis di tengah tekanan geopolitik. Secara teoritis, penelitian ini turut berkontribusi dengan menunjukkan bagaimana konstruktivisme menyediakan kerangka analitis yang lebih komprehensif untuk memahami konsistensi strategi Indonesia, khususnya dengan menegaskan bahwa identitas membentuk kepentingan dan menjelaskan alasan mendasar di balik penerapan hedging serta keberlanjutan prinsip Bebas Aktif di mana hal ini melengkapi literatur yang sebelumnya lebih menekankan aspek pragmatis atau material semata.

Dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin cepat berubah, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi praktis. Indonesia perlu mengoptimalkan strategi hedging melalui diversifikasi mitra ekonomi, penguatan kemampuan maritim, peningkatan kapasitas industri strategis, serta pendalaman diplomasi multilateral. Selain itu, Indonesia perlu memanfaatkan identitas Non-Blok untuk mendorong norma kawasan yang inklusif dan menolak polarisasi, terutama melalui ASEAN, G20, dan forum Global South. Dengan langkah-langkah ini,

otonomi strategis Indonesia dapat tetap terjaga meskipun tekanan geopolitik semakin intens. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip Non-Blok tetap menjadi pilar paling relevan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, memberikan arah yang jelas untuk menjaga independensi, stabilitas dan kepentingan nasional di tengah tatanan internasional yang tidak pasti.

REFERENSI

- Adler, E. & Pouliot, V. (2011) 'International practices', *International Theory*, 3(1), pp. 1–36. doi:10.1017/S175297191000031X.
- Al-Fadhat, F. (2022) "Indonesia's G20 presidency: neoliberal policy and authoritarian tendencies," *Australian Journal of International Affairs*, 76(6), pp. 617–623. Available at: <https://doi.org/10.1080/10357718.2022.2070598>.
- Andrena, C., 2025. Strategi Indonesia Dalam Merespon Pelemahan Pengaruh Amerika Serikat Dan Peningkatan Pengaruh Tiongkok Dalam Bidang Ekonomi. *Global Insight Journal*, 10(1).
- Anwar, D.F. (2020) "Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific," *International Affairs*, 96(1), pp. 111–129. Available at: <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>.
- Anwar, D.F. (2023a) "Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US-China rivalry in the Indo-Pacific region," *The Pacific Review*, 36(2), pp. 351–377. Available at: <https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2160794>.
- Anwar, D.F. (2023b) "Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US-China rivalry in the Indo-

- Pacific region,” *The Pacific Review*, 36(2), pp. 351–377. Available at: <https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2160794>.
- Aristama, F. (2023) “Emerging Middle Power dan Tantangan Perwujudan Visi Indonesia 2045 di Asia Pasifik: Systematic Review [Emerging Middle Power and Challenges on Realizing Vision of Indonesia 2045 in Asia Pacific: Systematic Review],” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), pp. 298–318. Available at: <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3427>.
- Basundoro, A. F. (2023). Pembelian Pesawat Tempur Dassault Rafale sebagai Implementasi Strategic Hedging Indonesia di Indo-Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1).
- Chatterjee, S. and Kumar, A. (2024) “Geoeconomics, Geopolitics, and the Contemporary International Order: Some Reflections,” in *Global Political Economy, Geopolitics and International Security*. Singapore: Springer Nature Singapore, pp. 35–53. Available at: https://doi.org/10.1007/978-981-97-2231-0_3.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). Research design and planning. In *Research methods in education* (pp. 173-201). Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dzikri, N. (2020) “Kontribusi Indonesia dalam Hubungan South-South Cooperation Periode 2016-2018,” *Indonesian Journal of International Relations*, 4(2), pp. 164–186.
- Fitriani, E. (2021) “Linking the impacts of perception, domestic politics, economic engagements, and the international environment on bilateral relations between Indonesia and China in the onset of the 21 st century,” *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(2), pp. 183–202. Available at: <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1955437>.
- Frías Sánchez, C.J. (2020) “The relevance of nuclear weapons in the 21st century,” *Araucaria*, (44), pp. 427–448. Available at: <https://doi.org/10.12795/araucaria.2020.i44.20>.
- Gerstl, A. (2022) *Hedging Strategies in Southeast Asia*. London: Routledge. Available at: <https://doi.org/10.4324/9781003212164>.
- Gunn, G.C. (2022) “The Cultural Parameters of Indonesian Foreign Policy since 1945,” in *Asian Culture, Diplomacy and Foreign Relations, Volume II*. BRILL, pp. 155–174. Available at: https://doi.org/10.1163/9789004508279_009.
- Heriamsal, K. and Amin, A. (2024) “Konservasi Mangrove Sebagai Sarana Diplomasi publik Indonesia di World Water Forum 2024,” *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 9(2), pp. 157–181.
- Iksan, M. and Soong, J.-J. (2023a) “The Political Economy of Indonesia’s Development Strategy under China-USA Power Rivalry and Hegemonic Competition: A Middle Power with Its Hedging Strategy,” *The Chinese Economy*, 56(4), pp. 304–320. Available at: <https://doi.org/10.1080/10971475.2022.2136696>.
- Iksan, M. and Soong, J.-J. (2023b) “The Political Economy of Indonesia’s Development Strategy under China-USA Power Rivalry and Hegemonic Competition: A Middle Power with Its Hedging Strategy,” *The Chinese Economy*, 56(4), pp. 304–320. Available at: <https://doi.org/10.1080/10971475.2022.2136696>.
- Indrawan, J., Purnaningtyas, G. and Suprayitno, D. (2023) “Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Sebagai Sarana Diplomasi Indonesia Secara Global,” *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), pp. 998–1008.

- Irawan, H.D. and Carnegie, P.J. (2025) "Different Strokes: Indonesian Statecraft in the North Natuna Sea," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1177/18681034251347973>.
- Jung, S.C., Lee, J. & Lee, J.Y. (2021) 'The Indo-Pacific Strategy and US Alliance Network Expandability: Asian Middle Powers' Positions on Sino-US Geostategic Competition in Indo-Pacific Region', *Journal of Contemporary China*, 30(127), pp. 53–68. doi:10.1080/10670564.2020.1766909
- Khurshid, I. (2025) "Modi's US Foreign Policy: Strategic Autonomy Redefined," *Journal of Asian and African Studies*, 60(1), pp. 552–560. Available at: <https://doi.org/10.1177/00219096231173395>.
- Kumaraswamy, P.R. (2024) "Challenges and Way Forward," in *Transformation of India's Foreign Policy*. London: Routledge, pp. 232–236. Available at: <https://doi.org/10.4324/9781003539063-9>.
- Kusumadewi, H. and Wiswayana, W.M. (2024a) "Multilevel Hedging for Middle-Regional Power: Indonesia Ascent Toward Powerhood Through Hedging," *Indonesian Journal of International Relations*, 8(2), pp. 392–413. Available at: <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i2.591>.
- Kusumadewi, H. and Wiswayana, W.M. (2024b) "Multilevel Hedging for Middle-Regional Power: Indonesia Ascent Toward Powerhood Through Hedging," *Indonesian Journal of International Relations*, 8(2), pp. 392–413.
- Laksmiana, E.A. (2021) "A Fragile Fulcrum: Indonesia-U.S. Military Relations in the Age of Great-Power Competition," *Asia Policy*, 16(4), pp. 106–114. Available at: <https://doi.org/10.1353/asp.2021.0057>.
- Liviana, R., Dewantari, A. and Rakhmadi, R. (2023) "Eksplorasi Kontribusi Ekonomi Indonesia sebagai Negara Global South di Tingkat Global," *Jurnal Terekam Jejak*, 1(1), pp. 1–22.
- McRae, D. (2019) "Indonesia's South China Sea Diplomacy: A Foreign Policy Illiberal Turn?," *Journal of Contemporary Asia*, pp. 1–21. Available at: <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1601240>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook. (No Title)*.
- Montolalu, R.R.K., Perwita, A.A.B. & Sudiyo (2023) 'The operational impacts of the U.S.–Indonesia strategic partnership on the joint military exercises Garuda Shield', *Indonesian Journal of International Relations*, 7(2), pp. 213–241. doi:10.32787/ijir.v7i2.459.
- Mubah A. Safril (2019a) "Indonesia's Double Hedging Strategy toward the United States–China Competition: Shaping Regional Order in the Indo-Pacific?," *Issues & Studies*, 55(04), p. 1940007. Available at: <https://doi.org/10.1142/S1013251119400071>.
- Mubah A. Safril (2019b) "Indonesia's Double Hedging Strategy toward the United States–China Competition: Shaping Regional Order in the Indo-Pacific?," *Issues & Studies*, 55(04), p. 1940007. Available at: <https://doi.org/10.1142/S1013251119400071>.
- Muhibat, S.F. (2016) "Indonesia-U.S. Security Collaboration: Still Under the Radar?," *Asian Politics & Policy*, 8(1), pp. 137–154. Available at: <https://doi.org/10.1111/aspp.12235>
- Nandyatama, R.W., Ardhani, I. and Alif Alvian, R. (2025) "Indonesia's Middle Power Diplomacy during COVID-19," in *Global Governance and The Political South*. London: Routledge, pp. 180–191. Available at:

- <https://doi.org/10.4324/9781003508526-15>.
- Nugraha, A., Madu, L., & Mulyanto, I. H. (2025). A Bridge Builder and a Voice of the Global South or a Risky Alignment? Role Conceptions of Indonesia's BRICS Membership. In *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* (Vol. 5, No. 2, p. 319). Research Synergy Foundation.
- Pant, H. V (2017) "The End of Non-Alignment?," *Orbis*, 61(4), pp. 527–540. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2017.08.004>.
- PANT, H. V. and SUPER, J.M. (2015) "India's 'non-alignment' conundrum: a twentieth-century policy in a changing world," *International Affairs*, 91(4), pp. 747–764. Available at: <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12336>.
- Paramitha, D.I., Syabana, M.N.A. and Amin, K. (2025) "Strengthening ASEAN's Stabilizing Role via ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," *Nation State: Journal of International Studies*, 8(1), pp. 61–79.
- Pedrasan, R. (2021) 'Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik dan geostrategi', JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 7, pp. 88. doi:10.29210/02021830.
- Pratama, A. (2020) 'Praktik Hedging dan Dampaknya Terhadap Superpower: Dalam Konteks Asia Pasifik', *Jurnal Sentris*, 1(1), pp. 50–61. doi:10.26593/sentris.v1i1.4128.50-61.
- Priamarizki, A. (2024) "Understanding the Domestic Determinants of Indonesians Hedging Policy towards the United States and China," *Contemporary Southeast Asia*, 46(1), pp. 19–42. Available at: <https://doi.org/10.1355/CS46-1b>.
- Putri, D.A., Anwar, S. and Sudibyo, S. (2025) "Diplomasi Pertahanan Indonesia di Tengah Ketidakpastian Regional: Antara Netralitas dan Keterlibatan Strategis (20232025)," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(4), pp. 1072–1077.
- Riska, R.F.D. (2024) "China's Belt and Road (BRI) Policy for Trade Interests in Indonesia," *Jurnal Suara Hukum*, 6(1), pp. 91–107. Available at: <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p91-107>.
- Rosyidin, M. (2023) *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sabaruddin, S.S. and Sabariman, H. (2023) "Analisis Potensi Pasar Non-Tradisional Dalam Meningkatkan Hubungan Ekonomi Indonesia dan Namibia," *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), pp. 1–12.
- Samosir, S.G. et al. (2024) "Indonesia's Role on G20," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(3), pp. 90–100.
- Setyowati, A. (2023) "Perkembangan Karakter Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(4), pp. 779–784. Available at: <https://doi.org/10.37676/mude.v2i4.4812>.
- Simatupang, K. H. (2025) "The US-China Competition and Indonesia's Stance in ASEAN During Jokowi's Leadership", *Sospol*, 11(3), pp. 33–50. doi: 10.22219/jurnalsospol.v11i3.36089
- Sumarwan, A. (2024) 'Cina tetap jadi mitra strategis kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia', *The Conversation*. Available at: <https://theconversation.com/cina-tetap-jadi-mitra-strategis-kebijakan-ekonomi-luar-negeri-indonesia-241907>.

- Teo, S. (2022) "Middle Power Awkwardness? Indonesia's Norm Entrepreneurship in ASEAN," in, pp. 151–176. Available at: https://doi.org/10.1007/978-981-16-0370-9_6.
- Trianjani, S. *et al.* (2025) "Evaluasi Keberhasilan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Memperkuat Peran Negara Dalam Hubungan Internasional," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(C), pp. 233–247.
- Wardhani, B. and Dharmaputra, R. (2024) "Indonesia's ambivalence in the Russia-Ukraine war: Balancing equal sovereignty norms with a familial approach," *Contemporary Security Policy*, 45(4), pp. 627–642. Available at: <https://doi.org/10.1080/13523260.2024.2397926>.
- Wendt, A., 1995. Constructing international politics. *International security*, 20(1), pp.71-81.
- Weyant, E. (2022) "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches: by John W. Creswell and J. David Creswell, Los Angeles, CA: SAGE, 2018, \$38.34, 304pp., ISBN: 978-1506386706." Taylor & Francis.
- Wicaksana, I.G.W. and Yakti, P.D. (2025) "Indonesia's New Partial Multialignment Strategy: A Conceptual and Empirical Analysis," *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of South-east Asia*, pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.1017/trn.2025.1>.
- Yan, K. (2023) "Navigating between China and Japan: Indonesia and economic hedging," *The Pacific Review*, 36(4), pp. 755–783. Available at: <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.2010795>.
- Yoshimatsu, H. (2022) "Indonesia's response to the Belt and Road Initiative and the Indo-Pacific: A pivotal state's hedging strategy," *Asian Politics & Policy*, 14(2), pp. 159–174. Available at: <https://doi.org/10.1111/aspp.1262>.
- Zou, Y. (2023) "China and Indonesia's responses to maritime disputes in the South China Sea: forming a tacit understanding on security," *Marine Policy*, 149, p. 105502. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.mar-pol.2023.105502>.